



Rencana Kerja

(RENJA)

Perubahan
Tahun 2021
Kecamatan Tambak



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN TAMBAK
Jalan Raya Tambak Nomor 16 Telp. 0287.472524

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2021 yang merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan maupun kekeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data dan diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Perubahan Renja tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas dan masyarakat pada umumnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini kami ucapkan terima kasih.

Tambak, Oktober 2021

CAMAT TAMBAK

IKA SUPRIHATIN, S. STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19780825 199810 2 001

DAFTAR ISI

Halaman	
Judul.....	.
Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Bab I Pendahuluan	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....	9
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	16
2.4. Review terhadap Renja Kecamatan Tambak Tahun 2021	10
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	2
	0
Bab IV Penutup	2
	9

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 maka Renja dapat dilakukan perubahan dikarenakan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2021, sehingga telah dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2021. Ketidakesuaian ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan nasional (RPJMN Tahun 2019-2024) dan kondisi pandemi Covid 19 sehingga kemudian telah dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan dijabarkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan (catatan : untuk SKPD dengan kondisi tsb).
2. Penambahan kegiatan baru akibat kebijakan nasional dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan antara lain dengan ditetapkannya Perpres 18 Tahun 2019 tentang RPJMN 2019-2024, dan ditetapkannya Perda nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sehingga telah ditetapkan pula perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, serta adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 tahun 2019, dan keadaan darurat atau keadaan luar biasa seperti halnya Pandemi Covid 19 yang memaksa Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan perencanaan.

Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, maka setiap perangkat daerah wajib menindaklanjuti berbagai perubahan yang terjadi dan menuangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tambak (Renja Perubahan Kecamatan Tambak) Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Banyumas No 52 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021. Renja Perubahan merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD Perubahan yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Banyumas.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tambak tahun 2021 adalah :

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
16. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventaris Gas Rumah Kaca;
18. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

- Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021.
 33. Peraturan Bupati Banyumas Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah:

Menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2021 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagian acuan Kecamatan Tambak dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Tambak selama tahun 2021.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dan perkiraan pencapaian target tahun 2021 Triwulan III dan IV. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2021, dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja kegiatan triwulan II atau semester I Tahun Anggaran 2021.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Analisis capaian kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas sampai dengan triwulan II tahun berkenaan menunjukkan hasil sebagai berikut :

Evaluasi Hasil RKPD

Tahun 2021

Ket. Warna : *Hitam : Tujuan, *Hijau:Sasaran,
*Merah:Program, *Orange:Kegiatan.

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021						Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Unit SKPD Penanggung Jawab	Permasalahan												
													1		2								8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
													K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
3	4	4A	5	6	7						8	9	12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17												
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp										
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima																																		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		86				84		84		84		84		84		100		84		97.67			KECAMATAN TAMBAK										
Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat																																		
	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100				100		100		100		100		100		100		100		100			KECAMATAN TAMBAK										

	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	Kali	35				35		35		35		6		7		7		20		7		20		KECAMATAN TAMBAK
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																									
	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Keg	20				20		20		20		7		9		16		80		16		80		KECAMATAN TAMBAK
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																									
	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100				100		100		100		100		100		100		100		100		100		KECAMATAN TAMBAK
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum																									
	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	2				0		0		0						0								KECAMATAN TAMBAK
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																									
	Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	unsur	5				5		5		5		5		5		5		100		5		100		KECAMATAN TAMBAK

	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	10				4		4		4		1		0		1		25		1		10		KECAMATAN TAMBAK
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																								
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	4				4		4		4		1		0		0								KECAMATAN TAMBAK
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3				3		3		3		3		3		3		100		3		100		KECAMATAN TAMBAK
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																								
	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	14				14		14		14		14		14		14		100		14		100		KECAMATAN TAMBAK
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																								
	Honor pengelola Keuangan Perangkat Daerah yang dibayarkan	Bulan	12				12		12		12		12		12		12		100		12		100		KECAMATAN TAMBAK
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6				6		6		6		6		6		6		100		6		100		KECAMATAN TAMBAK
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																								

	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	4			4		4		4		4		4		4		100		4		100		KECAMATAN TAMBAK
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5			5		5		5		5		5		5		100		5		100		KECAMATAN TAMBAK
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																							
	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	6			6		6		6		6		12		200				12		200		KECAMATAN TAMBAK
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																							
	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12			12		12		12														KECAMATAN TAMBAK
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																							
	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	6			2		2		2														KECAMATAN TAMBAK
	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	61171			21049		21049		21049		2.242		1.677		3.919						3.919		KECAMATAN TAMBAK
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																							
	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	400			400		400		400														KECAMATAN TAMBAK

Capaian Indikator Kinerja Utama dan kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah sebagian besar belum tercapai atau melampaui target kinerja yang direncanakan hal tersebut dikarenakan masih adanya Pandemi Covid 19. Dengan adanya Program PPKM dari Pemerintah Pusat menjadikan pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Program/Kegiatan terhambat. Hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan di semua kegiatan, baik di Kantor Kecamatan Tambak, desa-desa maupun di masyarakat.

Karena faktor tersebut diatas ada upaya dalam hal pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan secara online, hanya pelayanan yang bersifat darurat yang dilayani secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan Covid 19 dengan ketat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat di ujicoba juga penjualan produk-produk masyarakat secara online/delivery order/pesan antar melalui media-media sosial yang bisa di akses oleh masyarakat.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.432.609.150 dengan 5 (lima) program dan 9 (sembilan) kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut pada semester pertama sudah terealisasi sebesar Rp 1.055.266.176 dengan capaian kinerja fisik sebesar 44,65% dan capaian kinerja keuangan sebesar 43,38% Dengan penyerapan anggaran terendah dan tertinggi yaitu pada kegiatan:

1. Penyerapan terendah pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan penyerapan anggaran 0%;
2. Penyerapan tertinggi pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan penyerapan anggaran 44,04%.

Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, Silpa anggaran Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas adalah sebesar Rp. 1.377.342.974,00

2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Isu strategis yang masih perlu mendapatkan perhatian di Kecamatan Tambak tahun 2021 adalah

1. Masih belum optimalnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima
2. Masih belum optimalnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan menjadi tantangan Kecamatan Tambak. Kecamatan Tambak mempunyai tugas peran strategis di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya Tujuan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang

- menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
 - a. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;

- 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- b. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan ;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
- c. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
- d. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau
 - 2) pemeliharaan prasarana instansi vertikal yang terkait;
 - 3) pelaksanaan dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 4. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
- f. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:

- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
- 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
- i. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - i. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - ii. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok jabatan fungsional ;

2.3 Review Terhadap Renja Kecamatan Tambak Tahun 2021

Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian Tujuan Kecamatan Tambak dan Pemerintah Kabupaten Banyumas maka diperlukan penyesuaian indikator tujuan dan sasaran Kecamatan Tambak sesuai dengan Perubahan Renstra Kecamatan Tambak.

No.	Permendagri 90				Permendagri 90			
	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	14.100.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.100.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.706.669.039	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.706.669.039
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	39.300.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.300.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.466.300	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.466.300
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	183.384.960	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.384.960

				11.100.000			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.100.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.204.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.204.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.957.500	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.957.500
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.560.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.560.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.095.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.095.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.640.500	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.640.500
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4.500.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.500.000

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							Pengadaan Mebel	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	29.570.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	29.570.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	53.479.500	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.479.500
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							Pemeliharaan Mebel	

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	11.119.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	11.119.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	14.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	14.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	19.400.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	19.400.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	

	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	26.389.900	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	26.389.900
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	27.576.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	27.576.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12.472.000	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12.472.000
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	

	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	17.500.000	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	17.500.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	26.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Periode : 2019-2023

Unker : KECAMATAN TAMBAK

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
TOTAL						2.859.641.081		3.148.183.000		3.194.495.000		9.202.319.081	DAU; PAD	
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		84	2.859.641.081	85	3.148.183.000	86	3.194.495.000	86	9.202.319.081	DAU; PAD	
	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	76.796.005.187	100	84.689.985.000	100	85.856.901.000	100	247.342.891.187	DAU; PAD	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				29.024.000		29.124.000		29.373.000		87.521.000	PAD	

			Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	29.024.000	100	29.124.000	100	29.373.000	100	87.521.000	PAD
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			29.024.000		29.124.000		29.373.000		87.521.000	PAD
			Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	Jenis	2	29.024.000	2	29.124.000	2	29.373.000	2	87.521.000	PAD
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			15.024.000		15.074.000		15.206.000		45.304.000	PAD
			pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	Orang	2.000	15.024.000	2.000	15.074.000	2.000	15.206.000	2.300	45.304.000	PAD
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			14.000.000		14.050.000		14.167.000		42.217.000	PAD
			Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	Desa	12	14.000.000	12	14.050.000	12	14.167.000	12	42.217.000	PAD
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			57.576.000		57.689.000		58.356.000		173.621.000	PAD

			Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	57.576.000	100	57.689.000	100	58.356.000	100	173.621.000	PAD
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				57.576.000		57.689.000		58.356.000		173.621.000	PAD
			Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	12	57.576.000	12	57.689.000	12	58.356.000	12	173.621.000	PAD
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20.000.000		20.000.000		20.310.000		60.310.000	PAD
			jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	480	20.000.000	480	20.000.000	480	20.310.000	480	60.310.000	PAD
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				20.000.000		20.050.000		20.260.000		60.310.000	PAD
			Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	Kali	35	20.000.000	36	20.050.000	37	20.260.000	35	60.310.000	PAD

		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				17.576.000		17.639.000		17.786.000		53.001.000	PAD	
		Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Keg	20		17.576.000	20	17.639.000	20	17.786.000	20	53.001.000	PAD	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				22.500.000		20.050.000		20.260.000		62.810.000	PAD	
		Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100		22.500.000	100	20.050.000	100	20.260.000	100	62.810.000	PAD	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				20.000.000		15.250.000		14.960.000		50.210.000	PAD	
		Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	-		20.000.000	1	15.250.000	1	14.960.000	2	50.210.000	PAD	

		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				20.000.000		15.250.000		14.960.000		50.210.000	PAD	
			Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	unsur	5	20.000.000	5	15.250.000	5	14.960.000	5	50.210.000	PAD	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2.500.000		4.800.000		5.300.000		12.600.000	PAD	
			Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keg	-	2.500.000	1	4.800.000	1	5.300.000	2	12.600.000	PAD	
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				2.500.000		4.800.000		5.300.000		12.600.000	PAD	

		dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia												
			Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	Keg	1	2.500.000	2	4.800.000	2	5.300.000	2	12.600.000	PAD	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				46.000.000		20.050.000		40.260.000		106.310.000	PAD	
			Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	46.000.000	100	20.050.000	100	40.260.000	100	106.310.000	PAD	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				46.000.000		20.050.000		40.260.000		106.310.000	PAD	
			Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Desa	12	46.000.000	12	20.050.000	12	40.260.000	12	106.310.000	PAD	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa				20.000.000		20.050.000		20.260.000		60.310.000	PAD	
			Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Kali	36	20.000.000	36	20.050.000	36	20.260.000	102	60.310.000	PAD	

		Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				26.000.000	-			20.000.000		46.000.000	PAD
			Frekwensi Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kali	1	26.000.000	-	-	1	20.000.000	1	46.000.000	PAD
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.704.541.081		3.021.270.000		3.046.246.000		8.772.057.081	DAU; PAD
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	14.100.000	100	11.600.000	100	16.818.000	100	42.518.000	PAD
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.100.000		11.600.000		16.818.000		42.518.000	PAD
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	14.100.000	3	11.600.000	3	16.818.000	10	42.518.000	PAD
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14.100.000		11.600.000		16.818.000		42.518.000	PAD

			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	4	14.100.000	4	11.600.000	4	16.818.000	4	42.518.000	PAD
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	2.101.921.470	100	2.336.193.000	100	2.362.039.000	100	6.800.153.470	DAU; PAD
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.101.921.470		2.336.193.000		2.362.039.000		6.800.153.470	DAU; PAD
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	2.101.921.470	3	2.336.193.000	3	2.362.039.000	3	6.800.153.470	DAU; PAD
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.060.121.470		2.296.893.000		2.316.089.000		6.673.103.470	DAU
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	14	2.060.121.470	14	2.296.893.000	14	2.316.089.000	14	6.673.103.470	DAU
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				41.800.000		39.300.000		45.950.000		127.050.000	PAD
			Honor pengelola Keuangan Perangkat Daerah yang dibayarkan	Bulan	12	41.800.000	12	39.300.000	12	45.950.000	12	127.050.000	PAD
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	84.749.500	100	119.268.000	100	116.817.000	100	320.834.500	PAD

		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		19.500.000		30.793.000		50.293.000	PAD
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	-	-	2	19.500.000	2	30.793.000	4	50.293.000	PAD
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		19.500.000		30.793.000		50.293.000	PAD
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	-	-	2	19.500.000	2	30.793.000	2	50.293.000	PAD
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				84.749.500		99.768.000		86.024.000		270.541.500	PAD
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	2	84.749.500	2	99.768.000	2	86.024.000	2	270.541.500	PAD
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				29.570.000		36.060.000		38.515.000		104.145.000	PAD

			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	11	29.570.000	11	36.060.000	11	38.515.000	11	104.145.000	PAD
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			55.179.500		63.708.000		47.509.000		166.396.500	PAD
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	3	55.179.500	3	63.708.000	3	47.509.000	3	166.396.500	PAD
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	503.770.111	100	554.209.000	100	550.572.000	100	1.608.551.111	PAD
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			271.265.701		312.325.750		322.720.250		906.311.701	PAD
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	271.265.701	6	312.325.750	6	322.720.250	6	906.311.701	PAD
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.970.500		5.960.500		6.072.500		18.003.500	PAD
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	4	5.970.500	4	5.960.500	4	6.072.500	4	18.003.500	PAD
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			48.310.000		63.209.500		66.410.500		177.930.000	PAD

			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5	48.310.000	5	63.209.500	5	66.410.500	5	177.930.000	PAD
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			9.095.000		11.408.100		11.515.900		32.019.000	PAD
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	6	9.095.000	6	11.408.100	6	11.515.900	6	32.019.000	PAD
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			89.700.500		87.503.500		93.292.500		270.496.500	PAD
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	89.700.500	12	87.503.500	12	93.292.500	12	270.496.500	PAD
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.189.700		10.239.650		10.297.350		30.726.700	PAD
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	2	3.875.000	2	4.000.000	2	4.500.000	6	12.375.000	PAD
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	21.049	6.314.700	20.798	6.239.650	19.324	5.797.350	#### #	18.351.700	PAD
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			108.000.001		134.004.500		135.131.500		377.136.001	PAD

			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	400	108.000.001	400	134.004.500	400	135.131.500	400	377.136.001	PAD
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			232.504.410		241.883.250		227.851.750		702.239.410	PAD
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	232.504.410	3	241.883.250	3	227.851.750	3	702.239.410	PAD

		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				38.019.450		38.146.850		38.482.150		114.648.450	PAD
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	38.019.450	12	38.146.850	12	38.482.150	12	114.648.450	PAD
		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.100.000		11.650.000		10.721.000		33.471.000	PAD

			Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	3	11.100.000	3	11.650.000	3	10.721.000	3	33.471.000	PAD
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				183.384.960		192.086.400		178.648.600		554.119.960	PAD
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	8	183.384.960	8	192.086.400	8	178.648.600	8	554.119.960	PAD

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan terhadap output dan pagu indikatif program.

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan rencana kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	0				KECAMATAN													3.136.933.830	2.857.141.081		3.169.659.330	
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													2.984.333.830	2.704.541.081		3.011.583.330	
7	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													14.100.000	14.100.000		31.350.000	
7	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun Jumlah dokumen renstra yang disusun	Kesesuaian Dokumen	Kab. Banyumas , Tambak, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 %	100 %	14.100.000	14.100.000	PENDAPAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	100 %	14.100.000
7	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan, peng dan evaluasi yang dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perenc	endalian Kesesuaian Dokumen anaan		100 %	100 %	15 Kegiatan 12 Bulan	15 Kegiatan 12 Bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	100 %	17.250.000
7	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													2.330.475.620	2.101.921.470		2.330.475.620	

7	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangan	Kab. Banyumas, Tambak, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2.288.675.620	2.060.121.470	PENDA PAT ASLI DAERA (PAD) Dana Trans Umum - Dana Alokasi Umum	AN H fer si	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	2.288.675.620
7	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	Honor Pengelola K Daerah Perangkat Dibayarkan 2. Jasa T keuangannya yang dibayarkan administrasi, Kebersihan Per yang di bayarkan h 4. Biaya Sewa peral perlengkapan kant bayar	Daerah yang ransaksi a. Jumlah a. Th a. S a. N yang n e a. r b. P a. s y n a s r e G m a j i d a n a T n u n j a n g a n n y a a n o n y a a t a n d a n o r y a n g d i	Kab. Banyumas, Tambak, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	41.800.000	41.800.000			Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	41.800.000
7	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah											315.074.300	271.265.701					315.073.800
7	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia	Jasa langganan surat kabar, telepon internet, listrik dan air yang terbayar	Kab. Banyumas, Tambak, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5.970.500	5.970.500	PENDA PAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	5.970.000

7	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	1.Alat Tulis kantor yang tersedia 2.Perangko, Ma tera dan benda pos lainnya yang tersedia Bahan Perlengkapan Kerja Tersedia	Jasa langganan surat kabar,teleph on internet,listrik dan air yang terbayar	Kab. Banyumas , Tambak, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan 1350 Buah 12 Bulan	12 Bulan 1350 Buah 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	64.310.000	48.310.000	PENDA PAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	64.310.000
7	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Jasa langganan surat kabar,teleph on internet,listrik dan air yang terbayar	Kab. Banyumas , Tambak, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Jenis	12 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	11.374.000	9.095.000	PENDA PAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	11.374.000
7	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	Bahan Logistik Kantor yang tersedia Makan dan Minum harian Pegawai,Rapat ,dan Jamuan tamu yang tersedia	Jasa langganan surat kabar,teleph on internet,listrik dan air yang terbayar	Kab. Banyumas , Tambak, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Jenis 12 Bulan	12 Jenis 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	89.700.500	89.700.500	PENDA PAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	89.700.500
7	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Jasa langganan surat kabar,teleph on internet,listrik dan air yang terbayar	Kab. Banyumas , Tambak, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100000 eksemp	1a3r000 lembar	12 Bulan	12 Bulan	10.189.800	10.189.700	PENDA PAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	10.189.800
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	1.Kegiatan Koordinasi,Kon sult dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan 2.Perjalanan Dinas untuk Rapat,Koordinasi d Konsultasi	asi Jasa langganan surat kabar,teleph on internet,listrik dan air yang terbayar an		100 %	100 %	1 Tahun 135 Kali	1 Tahun 400 Kali	12 Bulan	12 Bulan	133.529.500	108.000.001	PENDA PAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	133.529.500

7	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								232.504.410	232.504.410				232.504.410				
	1	1	8																			
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	1.Pembayaran Pajak,PBB dan kendaraan dinas yang di bayar 2.Jasa langganan surat kabar,telepon ,internet,listrik dan air yang di bayar	Honor pengelola keuangan yang terbayar	Kab. Banyumas , Tambak, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	38.019.450	38.019.450	PENDA PAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	38.019.450
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	Belanja sewa yang terbayar	Honor pengelola keuangan yang terbayar	Kab. Banyumas , Tambak, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	11.100.000	11.100.000	PENDA PAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	11.100.000
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	1.Honor Pengelola Daerah Perangkat Dibayarkan 2.Jasa transaksi keu bayar 3.Tenaga Administrasi,Ke ama dan Kebersihan Per yang di bayar honor 4.Biaya Sewa Peral Perengkapan Kant	Keuangan Daerah yang angsan yang di Honor pengelola keuangan yang n'a'n ^{tb} ,P ^a e/n ^a gr emudi angkat Daerah nya tan dan or yang dibayar	Kab. Banyumas , Tambak, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan 1 Tahun 7 Orang 12 Bulan	12 Bulan 1 Tahun 8 Orang 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	183.384.960	183.384.960	PENDA PAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	183.384.960
7	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								92.179.500	84.749.500				102.179.500				
	1	1	9																			

7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	1.Kendaraan bermotor roda 4 dalam keadaan baik 2.Kendaraan bermotor roda 2 dalam keadaan baik	Kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2 dalam keadaan baik	Kab. Banyumas, Tambak, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit 9 Unit	2 Unit 9 Unit	12 Bulan	12 Bulan	37.000.000	29.570.000	PENDA PAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	100 %	37.000.000	
7	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	Peralatan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2 dalam keadaan baik	Kab. Banyumas, Tambak, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDA PAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	100 %	10.000.000	
7	0	0	2	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	Kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2 dalam keadaan baik		100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	12 Bulan	12 Bulan	55.179.500	55.179.500	PENDA PAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	100 %	55.179.500	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											29.024.000	29.024.000					23.000.000	
7	0	0	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											29.024.000	29.024.000						23.000.000
7	0	0	2	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	1.Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan yang terfasilitasi 2.Pemohon PATEN yang terlayani	Penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terfasilitasi		100 %	100 %	100 % 1500 Orang	100 % 1500 Orang	12 Bulan	12 Bulan	15.024.000	15.024.000	PENDA PAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	100 %	11.500.000	

7	0	0	2	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	Persentase PBB yang dapat terbayar	Penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terfasilitasi		100 %	100 %	93 %	93 %	12 Bulan	12 Bulan	14.000.000	14.000.000	PENDA PAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	100 %	11.500.000
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											57.576.000	57.576.000					57.576.000
7	0	0	2	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											57.576.000	57.576.000					57.576.000
7	0	0	2	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	1.Pelaksanaan Musrenbang di Desa dan Kecamatan 2.Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Desa 3.Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Desa yang terfasilitasi	Presentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	Kab. Banyumas , Tambak, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 % 12 Kali 1 Kali	100 % 12 Kali 1 Kali	100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	PENDA PAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	100 %	20.000.000
7	0	0	2	0	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	Presentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	Kab. Banyumas , Tambak, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Kali	20 Kali	100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	PENDA PAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	100 %	20.000.000

7	0	0	2.	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	Kab. Banyumas, Tambak, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	17.576.000	17.576.000	PENDAPAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	100 %	17.576.000
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											20.000.000	20.000.000					31.500.000
7	0	0	2.	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											20.000.000	20.000.000					25.750.000
7	0	0	2.	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Linmas terbina	1.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan yang tertangani 2.Penanganan gangguan trantibum yang dilaksanakan sesuai SOP	Penanganan gangguan trantibum yang dilaksanakan sesuai SOP	Kab. Banyumas, Tambak, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	PENDAPAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase Linmas terbina	100 %	20.000.000
7	0	0	2.	0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Linmas terbina	Pelaksanaan Rakor Linmas	Penanganan gangguan trantibum yang dilaksanakan sesuai SOP		100 %	100 %	5 Kali	5 Kali	100 %	100 %	0	0	PENDAPAT ASLI DAERA (PAD)	AN H	Persentase Linmas terbina	100 %	5.750.000
7	0	0	2.	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah											0	0					5.750.000

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Tambak Tahun 2021. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Kecamatan Tambak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2021, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tambak Tahun 2021 berpedoman pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Kecamatan Tambak dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.
3. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambak Tahun 2021 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.

CAMAT TAMBAK

IKA SUPRIHATIN, S. STP
NIP. 19780825 199810 2 001